

RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 – PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA



Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh merupakan salah satu tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goal's* (SDGS). Pada goal ini isu keamanan, ketertiban, penegakan hukum, hak asasi manusia, kelembagaan daerah serta pelayanan public menjadi target yang ingin dicapai. Tujuan 16 mengacu pada tiga isu utama yaitu adanya perdamaian (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*), serta keberadaan institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Dalam kaitannya ketiga isu utama tersebut, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo berupaya untuk mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan. Di bidang penegakan rule of law, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo telah berupaya dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan dengan ditunjukkan pada pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif juga menjadi modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Indonesia menekankan pada upaya pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, selain menjaga iklim demokrasi.

Status Capaian

1. Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus. Selama tahun 2020 kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan konvensional dari 3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus,

penipuan 234 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan sebanyak 165 kasus.

2. Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga masyarakat. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Selain itu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan dengan belum adanya laporan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah
3. Data P2TP2A tahun 2020 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi sebesar 338 kasus meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 177 kasus kekerasan perempuan dan anak atau naik sebesar 90,96 persen. Melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo, persentase kasus yang terlayani sebanyak 82,05 persen.
4. Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2021 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
5. Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2022 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini.
6. Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan, dan perbaikan dari semua aspek penilaian mulai dari komponen pengungkit yang terdiri dari : (1) Pemenuhan, (2) Hasil antara area perubahan, (3) Reform, dengan total skor 33,79 persen. Selanjutnya untuk komponen hasil, yang terdiri dari (1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, (2) Kualitas Pelayanan Publik, (3) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (4) Kinerja Organisasi, dengan skor 32,57. Sehingga total skor Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 63,36 atau predikat B.
7. Berdasarkan laporan kasus kriminal Kepolisian Daerah Gorontalo tahun 2021, jumlah kasus terbanyak masing-masing kantor polisi yaitu di Polres Gorontalo Utara sebanyak 638 kasus tindak pidana. Jumlah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontalo menurut data Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun 2021 sebanyak 2.592 kasus, menurun dibanding tahun 2020 sebanyak

3.775 kasus. Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	BPS	Kasus				Menurun	
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda	Kasus	16	NA	NA	Menurun	-
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Polda	Kasus				Menurun	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polda	Kasus				Menurun	
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Polda	Kasus				Menurun	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	Kasus	20,4	NA	51,72	Menurun	Tidak tercapai
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi						Menurun	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
	psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.							
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS				46	Menurun	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	BPS					Menurun	
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	BPS					Menurun	
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	BPS					Menurun	
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	BPS/POLDA					Menurun	
16,3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	Proporsi	-	NA	11.95	Menurun	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kemenkumham	Jumlah	184	Litigasi : 118 Nonlitigasi : 22	NA	Meningkat	
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Kemenkumham	Jumlah	-	200	100	Meningkat	Tidak tercapai
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.							
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.							
16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.							
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.							

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Bappeda		100%	100%	100%	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten:	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
							30%, Kota:41%).	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappeda					Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%,	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
							Kabupaten/ Kota: 2,38%).	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.						Meningkatnya penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
							Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.				Tidak ada penilaian ditahun 2021			
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	OMBUDSMAN	%	80	NA		Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
							Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80% pada tahun 2019.	
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	BPS	%	19,4	30%	26,67%	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan	Tercapai

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
							DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	NA	NA		Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan						Meningkatnya Indeks Kebebasan	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
	13esponsive menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.						Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30).	
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	%	NA	NA	83,21	Meningkatn ya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87).	
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.							
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	-	-	90,68	Meningkatn ya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
							penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DUKCAPIL	%	-	-	93,32	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	
	Kota Gorontalo	Dukcapil	%		65,514	99,93		
	Kabupaten Gorontalo	Dukcapil	%		133,478	93,53		
	Kabupaten Bone Bolango	Dukcapil	%		56,624	90,94		

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
	Kabupaten Pohuwato	Dukcapil	%		51,901	98,72		
	Kabupaten Boalemo	Dukcapil	%		50,352	95,87		
	Kabupaten Gorontalo Utara	Dukcapil	%		40,631	99,33		
16,1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.							
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Kemenkumham	Jumlah	-	1	2		Tercapai
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.							
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.							
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.						Terlaksananya proses penyelesaia	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
							n sengketa informasi	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.						Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya	

TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Kode	Target/Indikator TPB	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Target Perpres 59/2017	Status
				2016	2021			
							sertifikasi PPID.	
16.a	Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan							
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.							
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							